

**LAPORAN SEMESTER I**

**CAPAIAN KINERJA**



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku Semester I Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama tahun anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clear Government*) serta umpan balik untuk perencanaan berikutnya.

Laporan capaian kinerja Semester I tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP Maluku yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Laporan capaian kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian sasaran program BRMP Maluku tahun anggaran 2025

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kinerja selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.



Ambon, Juni 2025

Kepala Balai,

Dr. Gunawan, S.TP., M.Si  
NIP. 197612162005011002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku merupakan UPT di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) Pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; 3) pelaksanaan produksi bibit/benih sumber, dan penilaian kesesuaian; 4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; 5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BRMP Maluku tahun anggaran (TA) 2025 dijabarkan dalam rencana strategis BRMP Maluku 2024-2025 yang kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 yang di dalamnya termuat sasaran dan indikator kinerja balai. Pada tahun 2025 BRMP Maluku memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1) Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, dengan indikator kinerja, yaitu: Jumlah Pelaku usaha tani yang menerapkan targetnya 1 Usaha Tani, 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian Maluku targetnya Nilai 80, dan 3) Terkelolanya

Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Modernisasi Maluku targetnya Nilai 85.

Pada sasaran kesatu, yaitu meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian diwujudkan dalam kegiatan Standar Pertanian yang diterapkan dengan target output 295 yang menerapkan standar pertanian. Pada sasaran kedua, yaitu Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima diwujudkan dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup BRMP Maluku, dan pada sasaran ketiga, yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diwujudkan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran lingkup BRMP Maluku.

Hasil yang dicapai sampai dengan Semester I TA. 2025 untuk kegiatan penerapan standar pertanian adalah masih pada tahap persiapan, yaitu pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal, dan perbaikan petunjuk teknis kegiatan. Hal ini disebabkan karena blokir anggaran pada kegiatan utama sehingga pelaksanaan kegiatan masih menunggu pembukaan blokir anggaran.

Pada kegiatan Penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup BRMP Maluku belum melakukan penilaian mandiri triwulan.

Pada sasaran terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dicapai BRMP Maluku sampai dengan Semester I tahun 2025 mendapatkan nilai akhir 100,00 yang berasal 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu: 1) nilai kualitas perencanaan anggaran 100,00; 2) nilai kualitas pelaksanaan anggaran 100,00; dan 3) nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100,00. Nilai IKPA BRMP Maluku sampai dengan Semester I TA 2025 tersebut termasuk kategori sangat baik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Tujuan</b> .....	2
<b>1.3. Sasaran</b> .....	3
<b>1.4. Keluaran</b> .....	4
<b>II. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	5
<b>2.1. Capaian Kinerja</b> .....	5
<b>2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya</b> .....	6
<b>III. KEGIATAN STRATEGIS</b> .....	7
<b>3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	7
<b>V. KEGIATAN DUKUNGAN DAN MANAJEMEN</b> .....	13
<b>4.1. Laporan Aplikasi Monev <i>online</i></b> .....	13
<b>VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP</b> .....	17
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	17
<b>5.2. Saran dan Penutup</b> .....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian kinerja BRMP Maluku Semester I Tahun 2025.....	6
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelaku Usaha Menerapkan Standar Pertanian.....	7
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Yang Efektif Dan Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima.....	9
Tabel 3. 3 Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.....	12

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Nilai IKPA Semester I Tahun 2025.....	12
---	----

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Lahirnya BRMP Maluku diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Pada Peraturan Presiden tersebut di bab III Organisasi, bagian kesatu Susunan Organisasi, pasal 7 Kementerian Pertanian telah lahir 1 (satu) badan baru dalam susunan organisasi Kementerian Pertanian, yaitu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Pada bagian kesepuluh, pasal 33 disebutkan bahwa Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada bab II, pasal 2 dijelaskan bahwa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Pada bagian kedua puluh empat pasal 138 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang bertugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Pada lampiran II disebutkan bahwa meliputi Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian ada di 33 provinsi dan salah satunya adalah Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian Maluku.

Tugas BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) Pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; 3) pelaksanaan produksi bibit/benih sumber, dan penilaian kesesuaian; 4) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; 5) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; 6)

Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.

Pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Balai Besar Perkembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian telah melakukan Pengukuran kinerja dan melaporkannya secara rutin kepada BRMP dan seterusnya kepada Menteri Pertanian.

## **1.2. Tujuan**

Laporan bulanan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Besar Perkembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya yang didasari suatu perencanaan strategis, dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.217/KPTS/PW./60/H/02/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian

Pertanian. Selain itu tujuan dari Laporan Kinerja adalah menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian diterapkan tingkat di Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Pertanian serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan laporan bulanan adalah sarana pemantauan capaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai antisipasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran dan target Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Standar Pertanian Yang Mendukung Pertanian Berkelanjutan Dan Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan BRMP Maluku, Dan
3. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran BRMP Maluku Yang Akuntabel Dan Berkualitas.

### **1.3. Sasaran**

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BRMP Maluku mempunyai 3 (tiga) sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya usaha tani yang menerapkan standar pertanian,
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan
3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

#### **1.4. Keluaran**

Keluaran capaian kinerja BRMP Maluku Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan standar 1 (Usaha Tani).
2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Maluku 80 (Nilai).
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku 85 (Nilai).

## **II. AKUNTABILITAS KINERJA**

### **2.1. Capaian Kinerja**

BRMP Maluku telah menetapkan tiga sasaran program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu: 1) Meningkatnya Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian, 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Penerapan Mekanisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, serta 3) Terkelolanya Anggaran Badan Penerapan Mekanisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Penetapan sasaran tersebut diikuti oleh rincian indikator kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025. Sasaran strategis dan target keluaran hasil tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan di sektor pertanian, khususnya dalam penerapan standar pertanian spesifik lokasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu: (1) sangat berhasil: > 100%, (2) berhasil: 80 – 100%, (3) cukup berhasil: 60 – 79%, dan kurang berhasil: < 60%.

Hasil capaian kinerja BRMP Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dilakukan penilaian secara mandiri. Hasil capaian tersebut berdasarkan laporan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan kepada Kepala Balai terkait perkembangan capaian IKU, disertai hasil monitoring dan evaluasi tim monitoring dan evaluasi (monev) secara selektif untuk memastikan sejauh mana target setiap kegiatan tercapai. Metode yang digunakan untuk memantau capaian output adalah melalui pelaporan berkala capaian kinerja setiap bulan, triwulan dan Triwulan beserta kendala yang dihadapi.

Dengan demikian, diharapkan bila ada target indikator yang tidak tercapai dapat diantisipasi sejak awal. Capaian kinerja BRMP Maluku Semester I tahun 2025 tersedia pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Capaian kinerja BRMP Maluku Semester I Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha Tani)	1	0	0	Kurang berhasil
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku (Nilai)	80	82,90	103,65	Berhasil
3.	Terkelolanya Anggaran Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian Maluku yang Akuntabel dan Berkualitas.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian Maluku (Nilai)	85	95,58	112,45	Berhasil
<b>Nilai rata-rata</b>						

Sumber: data primer, 2025

## 2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan umum yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BRMP Maluku adalah adanya pemblokiran anggaran. Beberapa upaya tindak lanjut permasalahan, yaitu percepatan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan operasional kantor.

### III. KEGIATAN STRATEGIS

#### 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

##### 3.1.1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian

##### I. Identifikasi Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian

Sasaran program kesatu dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian dengan indikator kinerja, yaitu jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian yang targetnya 1 usaha tani. Pada sasaran program kesatu diwujudkan dalam kegiatan Identifikasi pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian dengan target output 1 (satu) dokumen SNI untuk yang diterapkan.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelaku Usaha Menerapkan Standar Pertanian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha Tani)	1	0	0	Kurang berhasil

Sumber: data primer, 2025

Capaian kinerja untuk sasaran program meningkatnya pengelolaan pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian sampai dengan Semester I tahun 2025 belum mencapai target karena pemblokiran anggaran.

Kegiatan penerapan standar pertanian merupakan kegiatan yang menjadi cikal bakal untuk terbitnya laporan adanya pelaku usaha yang menerapkan standar pertanian spesifik lokasi di Maluku.

### **3.1.2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Sasaran program kedua dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah terwujudnya birokrasi badan penerapan standar pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku targetnya 80. Pada sasaran program ketiga diwujudkan dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM di lingkungan BRMP Maluku.

Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Zona Integritas (ZI) merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi (RB) di unit kerja, untuk mewujudkan unit pelayanan yang prima, berkinerja tinggi dan berintegritas. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai show windows aktualisasi/representasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Zona Integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian (BRMP) Maluku berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi di balai yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Target nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk tahun 2024 pada BRMP Maluku adalah 80. Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan oleh BRMP Maluku untuk mencapai target pembangunan ZI-WBK/WBBM, yaitu: 1) komitmen pimpinan dan semua pegawai dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, 2) kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality (keramahan) untuk kepuasan publik, 3) program yang menyentuh masyarakat dengan cara menyusun program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja

tersebut, 4) monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, 5) manajemen media dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Komponen Penilaian Zona Integritas pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu: 1) pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya) dan 2) reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Setelah Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja sesuai LKE tersebut, TPI menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi pemerintah terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Yang Efektif Dan Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Mekanisasi Pertanian Maluku	Nilai 80	82,90	103,65	Berhasil

Sumber: data primer, 2025

Capaian kinerja untuk sasaran program terwujudnya birokrasi badan penerapan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima sampai dengan Juni tahun 2025 berdasarkan penilaian mendapatkan skor 82,90.

Nilai Pembangunan ZI tersebut berada di atas target (80) sehingga ketercapaian ini menjadi bagian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna menghadapi penilaian akhir di Triwulan IV yang dilaksanakan pada periode November.

### **3.1.3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Sasaran program ketiga dalam Perjanjian Kinerja BRMP Maluku Tahun 2025 adalah terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku targetnya 85. Pada sasaran program keempat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran BRMP Maluku TA 2025. Penetapan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang akan digunakan sebagai acuan masih dalam pembahasan antara nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran yang terdapat pada aplikasi SMART Kemenkeu yang sekarang berubah nama menjadi Monev Kemenkeu atau akan menggunakan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) revisi DIPA dan 2) deviasi halaman III DIPA.
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) penyerapan anggaran, 2) belanja kontraktual, 3) penyelesaian tagihan, 4) pengelolaan Uang

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dan 5) dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu capaian *output*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$
- b. baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$
- c. cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$
- d. kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- a. pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau
- b. menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA BRMP Maluku Semester I pada bulan Juni tahun 2025 adalah 95,58 dengan uraian sebagai berikut:

- I. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai 88,65 terdiri dari Revisi DIPA (10,00) dan Deviasi Halaman III DIPA (11,60).
- II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 99,39 terdiri dari Penyerapan Anggaran (20,00), Belanja Kontraktual (0), Penyelesaian Tagihan (0), Pengelolaan UP dan TUP (9,88) dan Dispensasi SPM (0,00).
- III. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 95,58 yang berasal dari Capaian *Output* (0,00).
- IV. Nilai IKPA BRMP Maluku sampai dengan Juni 2025 tersebut termasuk kategori sangat baik

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU**

Periode s.d. Juni

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Saluran Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Juni	001	018	557737 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU	Nilai	100,00	77,30	100,00	0,00	0,00	98,78	99,95	78,46	80%	0,00	95,53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,80	20,00	0,00	0,00	9,88	24,99				
					Nilai Aspek	88,65				99,39	99,95					

Gambar 3. 1 Nilai IKPA Semester I Tahun 2025

Tabel 3. 3 Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Nilai 85	95,58	112,45	Berhasil

Sumber: data primer, 2024

Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas sampai dengan Semester I tahun 2025 jika menggunakan acuan nilai IKPA maka sangat baik mencapai target NKA BRMP Maluku. Nilai Kinerja Anggaran yang mengacu pada aplikasi Monev Kemenkeu akan dihitung secara komprehensif pada akhir tahun di bulan Desember 2025. Upaya untuk meningkatkan nilai IKPA, perlu komitmen yang kuat dari pelaksana kegiatan di BRMP Maluku untuk mencapai target capaian *output* 100% pada Desember 2025.

## **V. KEGIATAN DUKUNGAN DAN MANAJEMEN**

### **4.1. Laporan Aplikasi Monev *online***

BRMP Maluku berkewajiban melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi monev online, diantaranya yaitu (1) Pelaporan SMART DJA, (2) Pelaporan E-Monev Bappenas, (3) Pelaporan E-Monev BRMP, dan (4) Pelaporan E-SAKIP.

#### **4.1.1. SMART DJA**

Aplikasi SMART DJA adalah aplikasi monitoring dan evaluasi yang berbasis web dan dikembangkan oleh DJA, Kemenkeu. Aplikasi ini sebagai alat untuk mengukur IKU NKA. Dengan adanya PMK 62/2023 terkait sinergi monev DJA dengan DJPB dalam meningkatkan kualitas belanja, proses entry data dilaksanakan oleh operator SAKTI. Agar nilai kinerja anggaran pada aspek perencanaan dapat optimal, maka perludilakukan beberapa langkah berikut:

1. Pastikan semua RO tercapai di akhir tahun dengan melakukan identifikasi sedini mungkin, mana saja RO yang mengalami kendala. Ketika semua nilai  $RVRO \geq TVRO$  maka nilai efektivitas 100 (bobot 75%).
2. Pastikan ada minimal 1 RO yang *link* dengan SBK.
3. Pastikan semua RO yang *link* dengan SBK memiliki indeks RS di bawah indeks SBK agar mendapatkan nilai efisiensi (bobot 15%).

Penentuan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) bulan Juni 2025 ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Namun kepastian cara penentuan NKA ini masih menunggu kesepakatan internal BRMP apakah masuk dalam PK Monev atau PK Keuangan. Target Nilai kinerja Anggaran (NKA) BRMP Maluku tahun 2025 sebesar 85, capaian hingga bulan Juni 2025 sebesar 47,79.

#### **4.1.2. E-MONEV BAPPENAS**

Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi yang didukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Aplikasi e-Monev sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L

merupakan instrumen yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah.

Pengendalian Pelaksanaan rencana pembangunan dikaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan (PP 39/2006). Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilaporkan secara daring melalui aplikasi e-monev. Data realisasi diinput oleh user e-Monev, termasuk realisasi anggaran karena belum berintegrasi dengan Aplikasi SAKTI di Kemekeu.

Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UK bersama dengan penanggung jawab kegiatan UK melakukan konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan dan target kinerja kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Data dasar yang digunakan dalam aplikasi e-Monev adalah Renja KL-KRISNA Aplikasi e-Monev Bappenas diinput bulanan oleh UK/UPT. Data yang diinput pada level: komponen, *output* (RO dan RO Satker), serta indikator kinerja (IKP dan IKK). Adapun data yang dilaporkan berupa: realisasi fisik dan anggaran per bulan, permasalahan yang dihadapi, dan bukti pendukung pelaksanaan, baik berupa dokumen foto/video. Sistem e-Monev dibangun dengan *platform web based online*. Untuk dapat mengakses sistem e-monev dapat mengetik alamat: <http://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan bulanan dengan verifikasi triwulanan oleh K/L melalui Biro Perencanaan. Laporan divalidasi di tingkat Kementerian Pertanian paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

Adapun kerangka pelaksanaan e-Monev sebagai berikut:

Langkah 1 : pemantauan pelaksanaan renja-KL

Langkah 2 : Pelaporan data realisasi hasil pelaksanaan Renja KL

Langkah 3 : Verifikasi pelaporan

Capaian kinerja BRMP Maluku berdasarkan data e-monev Bappenas hingga Juni 2025 sebagai berikut:

1. Serapan anggaran BRMP Maluku hingga Juni 2025 sebesar 44,79%.
2. Pelaksanaan hingga Juni 2025 sebesar 35,33%.
3. Pemanfaatan hingga Juni 2025 sebesar 33%.
4. Berdasarkan kelengkapan data pelaporan Komponen dan RO dari April sampai dengan Juni tercapai 100%.

#### 4.1.3. E-MONEV BRMP

Aplikasi e-Monev BRMP untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup BRMP. Aplikasi belum bisa digunakan karena masih dalam tahap pengembangan.

#### 4.1.4. E-SAKIP

Dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen lingkup Kementerian Pertanian termasuk manajemen monitoring dan evaluasi kinerja, maka Kementerian Pertanian telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi berbasis *web* sebagai tuntutan dan kebutuhan manajemen. Sistem IKK *Online* terkandung dalam aplikasi SAKIP yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin dalam penyajian data indikator kinerja utama (IKU) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mendukung IKU Kementerian Pertanian yang *terupdate*, valid dan *accountable*. Aplikasi SAKIP ini kemudian dikembangkan menjadi e-SAKIP yang disosialisasikan pada tanggal 8-9 Agustus 2018. Aplikasi e-SAKIP ini memfokuskan substansi "cascading IKU dari level 1 (BRMP) sampai dengan level 4 (Balit/Lolit)". Secara garis besar yang perlu *entry* dalam aplikasi e-Sakip ini ada 4 (empat) kategori untuk tiap level 3 dan 4, yaitu pengisian data sasaran strategis, pengisian data indikator kinerja, pengisian data target IKU, rencana aksi kegiatan dan pengisian capaian IKU/validasi data IKU.

Sesuai dengan **Renstra BRMP 2025**, BRMP memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: 1) Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Menerapkan Standar Pertanian, 2) Terwujudnya lembaga yang berintegritas mewujudkan WBK/WBBM, dan 3) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel serta 3 (tiga) indikator kinerja. Ketiga indikator kinerja, yaitu: 1) Jumlah Pelaku Usaha Tani Yang Menerapkan Standar Pertanian, 2) Nilai Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, 3) Nilai Kinerja Anggaran Badan Penerapan Mekanisasi Pertanian.

Di tahun 2025, aplikasi e-SAKIP ini sedang dalam tahap pengembangan baik berupa fitur, fungsi, dan lainnya sehingga sampai dengan akhir bulan Juni 2025, aplikasi ini belum dapat digunakan. Pada aplikasi e-SAKIP pengisian capaian target triwulan belum dapat dilakukan karena pada e-PK belum dapat dilakukan pengisian *breakdown* target, sehingga dalam aplikasi e-SAKIP masih

terdapat ketidaksesuaian data unit kerja, khususnya pada menu peta indikator kinerja.

## **VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Secara umum, pelaksanaan kegiatan BRMP Maluku TA 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2025 berjalan dengan baik untuk kegiatan dukungan manajemen, yaitu operasional kantor, sedangkan kegiatan utama belum dapat dilaksanakan karena pemblokiran anggaran. Perlu disusun perencanaan kegiatan dengan baik sehingga ketika anggaran kegiatan utama sudah dilakukan pembukaan blokir maka kegiatan dapat langsung dilaksanakan sesuai perencanaan, hal ini akan mempercepat capaian realisasi kegiatan sesuai target.

### **5.2. Saran dan Penutup**

Melalui penyusunan laporan kinerja secara periodik, diharapkan informasi yang komprehensif tentang pencapaian tujuan dan target program BRMP Maluku TA 2025 dapat diketahui dengan lengkap. Laporan ini juga diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait program BRMP Maluku tahun 2025.